



PKM MENINGKATKAN EKONOMI DENGAN MENGATASI MASALAH SAMPAH MELALUI BANK SAMPAH

Luis Fiska Rahayu¹

¹Universitas Bina Bangsa

Email: luis.fiska.rahayu@binabangsa.ac.id

ABSTRAK

Permen LHK 14 tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah memiliki maksud bahwa Pengelolaan Sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir dengan pendekatan ekonomi sirkular oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat, sehingga memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan.

Permen LHK 14 tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah menjelaskan bahwa Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah.

Bank Sampah adalah fasilitas untuk mengelola Sampah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan Ekonomi Sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau pemerintah daerah.

Keyword: Permen LHK 14 tahun 2021, Bank Sampah

ABSTRACT

Minister of Environment and Forestry Regulation 14 of 2021 concerning Waste Management in Waste Banks has the intention that Waste Management needs to be carried out in a comprehensive and integrated manner from upstream to downstream with a circular economy approach by the central government, regional governments and the community, so as to provide economic benefits, be healthy for the community, and safe for the environment.

LHK Ministerial Regulation 14 of 2021 concerning Waste Management in Waste Banks explains that waste is the residue of human daily activities and/or natural processes in solid form. Waste Management is a systematic, comprehensive, and sustainable activity that includes waste reduction and handling.

Waste Bank is a facility to manage waste with the 3R principle (Reduce, Reuse, and Recycle), as a means of education, behavior change in waste management, and the implementation of a Circular Economy, which is formed and managed by the community, business entity, and/or local government.

Keyword: Ministry of Environment and Forestry Regulation 14 in 2021, Garbage Bank

LATAR BELAKANG PENGABDIAN

Permasalahan sampah di Indonesia seolah belum pernah terlihat ujungnya. Selain mencemari lingkungan, ternyata persoalan sampah juga mengancam target nol emisi. Berdasarkan data *Indonesia National Plastic Action Partnership* yang dirilis April 2020, sebanyak 67,2 juta ton sampah Indonesia masih menumpuk setiap tahunnya, dan 9

persennya atau sekitar 620 ribu ton masuk ke sungai, danau dan laut. Di Indonesia diperkirakan sebanyak 85.000 ton sampah dihasilkan per harinya, dengan perkiraan kenaikan jumlah mencapai 150.000 ton per hari pada tahun 2025. Jumlah ini didominasi oleh sampah yang berasal dari rumah tangga, yang berkisar antara 60 hingga 75 persen (Kompas, 29-10 2021)

Bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah dalam mengatasi masalah sampah?, dalam *scope* nasional Pemerintah telah banyak melakukan upaya dalam mengurangi timbulan sampah melalui Kementerian LHK terbit Permen No 52 Tahun 2019 tentang GPBLHS dan Permen no 14 Tahun 2021 tentang Bank Sampah, ini salah satu diantara upaya untuk pengurangan sampah dan pengendalian sampah serta perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Bagaimana implementasi di daerah, apakah pelaksanaan sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan? Penulis akan melihat permasalahan di daerah, ada beberapa daerah yang telah berhasil menekan timbunan sampah dan ada beberapa daerah yang permasalahan sampahnya masih belum terkendali. Sumber utama sampah adalah dari sampah rumah tangga, sehingga jumlah penduduk dalam suatu daerah sangat berpengaruh dengan jumlah sampah yang dihasilkan.

METODE PENGABDIAN

Dalam melaksanakan kegiatan penulis akan mengumpulkan data sampah yang di hasilkan per hari di Kab Kota (sampling di 2 TPA) yaitu TPA Cilowong di Kota Serang dan TPA Rawa Kucing di Kota Tangerang, ke dua TPA (Tempat Pembuangan Akhir) menurut penulis sudah dapat mewakili kota Besar dan Kota Kecil di Provinsi Banten, kemudian penulis juga akan melihat jumlah penduduk di ke dua kota tersebut sesuai dengan yang terdapat pada data statistic terbaru pada Badan Pusat Statistik di Provinsi Banten, dari data tersebut dapat dilihat besaran sampah yang dihasilkan berbanding dengan jumlah penduduk atau tidak, kemudian melakukan wawancara dengan pihak terkait atau Dinas Lingkungan Hidup terkait upaya yang telah dilakukan dalam mengurangi sampah, megumpulkan data Bank sampah atau TPS 3R yang ada di daerah tersebut, dari jumlah bank sampah tersebut bias diketahui jumlah sampah yang bisa dipilah dan di daur ulang samapi berapa pengurangannya dan seberapa efektif bias mengurangi sampah yang akan dibuang di TPA.

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan selama 2 Bulan yaitu di Bulan Februari sampai dengan Maret tahun 2022

HASIL DAN PEMBAHASAN PENGABDIAN

Upaya Daerah melalui dinas terkait yaitu dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat dengan pengurangan sampah, mendirikan banyak bank-bank sampah, adanya program kampung iklim dan sebagainya, bank sampah akan sangat membantu dalam pemilahan sampah, semakin banyak bank sampah yang aktif maka akan sangat membantu dalam pengurangan sampah,

Harapan dengan adanya bank sampah adalah bahwa sampah yang akan di bawa oleh petugas kebersihan adalah hanya residu atau sampah yang memang sudah benar benar tidak dapat digunakan lagi, dan apabila ini semua dapat terlaksana maka sangat

membantu memperpanjang usia dari Tempat Pembuangan Sampah Akhir di suatu daerah.

Memang tugas pengelolaan sampah tidak dapat dibebankan oleh hanya Pemerintah dalam hal ini Dinas Kebersihan atau Dinas Lingkungan Hidup namun butuh kerjasama dari beberapa sektor dan juga adalah masyarakat sebagai penyumbang utama sampah dan pelaku utama dalam pengelolaan sampah. Tugas dari dinas LH atau yang membidangi lingkungan mendorong terbentuknya bank sampah dan memberikan pembinaan kepada bank sampah yang telah di bentuk, Dinas LH juga memberikan pembinaan melalui sekolah dengan program Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan yang didalamnya juga terkait dengan pengelolaan sampah, Pengurangan sampah dan 3R (Reduce, Reuse Recycle) Dinas LH juga yang menjadi komando dalam penilaian Adipura yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, namun Dinas ini tidak akan mampu menyelesaikan permasalahan sampah ini sendirian karena permasalahan sampah adalah permasalahan yang sangat kompleks, ada Dinas Kebersihan sebagai pelaku dalam melakukan pembersihan dan pengangkutan sampah dari lokasi TPS ke TPSA, ada OPD Satpol PP sebagai penegak Perda bagi daerah yang telah mengeluarkan Perda tentang sampah dan Dinas lain yang secara tidak langsung berkaitan dengan pengelolaan sampah.

Bagaimana dengan dukungan Pimpinan Daerah dalam pengelolaan sampah? Ada beberapa daerah yang memang kepala daerah sangat intens dalam pengelolaan sampah, mereka akan banyak menggelontorkan anggaran untuk mendukung masalah sampah, misalnya memperbanyak fasilitas (kendaraan angkut, tempat sampah terpilah, alat pengolahan sampah, memberikan anggaran untuk sosialisasi dan sebagainya) ini sangat penting dilakukan oleh Kepala Daerah agar permasalahan sampah di daerahnya bisa diatasi.

Kepala Daerah yang mempunyai kemauan untuk mendapatkan Adipura pasti akan sangat *Commit* dalam menyelesaikan permasalahan sampah karena salah satu penilaian yang memiliki poin sangat besar adalah tentang penurunan sampah dan pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir pada daerah tersebut, dalam penilaian Adipura biasanya dilakukan 2 kali yaitu Penilaian ke-1 dan Penilaian ke-2, Penilaian ke 1 diambil dari data penurunan sampah dan pengelolaan sampah atau Jakstrada (Kebijakan dan Strategi daerah dalam Pengelolaan sampah), disini tim penilai akan mengetahui apakah daerah tersebut sudah mampu mengatasi permasalahan sampah dan upaya pengurangan sampahnya sampai dimana sehingga dapat diambil nilai keberhasilan dengan melihat neraca pengurangan sampahnya.

Berikut adalah hasil dokumentasi Partisipasi Masyarakat dalam mengelola sampah:





KESIMPULAN

Kesimpulannya Penulis mencoba memberikan gambaran bahwa pengelolaan sampah di daerah tidak bisa dibebankan oleh satu OPD saja namun diperlukan kerjasama semua *stakeholder* dan juga masyarakat, karena sampah adalah masalah kita semua yang harus bisa dikendalikan, perlu dukungan anggaran dan komitmen dari Kepala Daerah dalam mengatasi permasalahan sampah, selain itu ada target yang harus

diperoleh suatu daerah agar menjadi rangsangan bagi masyarakat yaitu bisa memperoleh predikat sebagai Kota Adipura suatu kebanggaan bagi warganya, perlu aturan yang tegas melalui Perda terkait sampah (misalnya Yustisi)

Harapan penulis bahwa lingkungan akan menjadi nyaman tanpa adanya sampah dan kesadaran masyarakat akan semakin meningkat dengan tidak membuang atau menghasilkan sampah yang berlebihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ratnasari, A., Asharhani, I. S., Sari, M. G., Hale, S. R., & Pratiwi, H. (2019). Edukasi pemilahan sampah sebagai upaya preventif mengatasi masalah sampah di lingkungan sekolah. *Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR)*, 2, 652-659.
- Widikusyanto, M. J., Wahyu, O. W., & Hermansyah, A. W. (2015). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pembentukan Bank Sampah dan Pembuatan Pupuk Kompos dengan Metode Takakura untuk Mengatasi Masalah Sampah dan Pembiayaan Pendidikan Anak Usia Dini. *Prosiding Sinergi Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha Untuk Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan: Kesehatan dan Lingkungan Hidup. Konferensi Nasional Pengabdian kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM CSR)*. Tangerang: UMN Press, 111-121.
- Mu'arif, S., Yulianto, Y., Muanifah, S., Cahyani, Y., & Ridwan, M. (2020). Peran Bank Sampah Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Dengan Menyulap Sampah Menjadi Rupiah pada Bank Sampah Sri Rejeki. *Dedikasi PKM*, 1(3), 48-54.
- Zulkarnain, F., & Dewi, I. D. (2020). PKM Pembuatan Saluran Drainase Dusun li Jln Inpres Desa Tanjung Gusta Untuk Mengatasi Banjir. *JURNAL PRODIKMAS Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 69-73.
- Sandika, I. K. B., Ariasih, N. K., Sutarwiyasa, I. K., Lesmana, P. S. W., Ginantra, N. L. W. S. R., Widiartha, K. K., ... & Indrawan, I. G. A. (2022). PKM Optimalisasi Pengelolaan Sampah Melalui Pemilahan Pada Sumber Timbulannya di Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sains dan Teknologi*, 1(4), 88-96.
- Nindya, S., Cantrika, D., Murti, Y. A., Widana, E. S., & Kurniawan, I. G. A. (2022). Edukasi pengolahan sampah organik dan anorganik di desa rejas tabanan. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 35
- Widiyanti, A., Rahmayanti, A., Hamidah, L. N., Chikmawati, Z., Prayogi, Y. R., & A'yuni, Q. (2019). Pengelolaan Sampah dengan Sistem 3R di Bank Sampah Cangkringsari Berseri Desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. *E-Prosiding SNasTekS*, 1(1), 77-82.
- NURWULAN, R. L., Mariane, I., & Kurniasih, N. (2021). PKM PEMBERDAYAAN KELOMPOK PKK MELALUI PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA WANAYASA KECAMATAN WANAYASA KABUPATEN PURWAKARTA. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 3(1), 26-31.